

Judul : Setelah Tak Jadi Ibukota, Inilah Dua Opsi Status Jakarta
Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Setelah Tak Jadi Ibu Kota, Inilah Dua Opsi Status Jakarta

Pemerintah tengah menyusun RUU Ibu Kota Negara (IKN). Ada dua opsi terkait status Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Opsi pertama, Jakarta menjadi pusat ekonomi dan bisnis dengan otonomi khusus. Opsi kedua, Jakarta menjadi daerah otonomi biasa. Tanpa adanya kekhususan seperti daerah lain.

"SAAT ini, DKI Jakarta masih menjadi ibu kota dengan UU khusus. Namun, dengan adanya rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, maka pertanyaannya adalah bagaimana status dari DKI," ujar Tito di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Status DKI Jakarta harus diubah dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.

Dia mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang ditunjuk sebagai *leading sector* pemindahan ibu kota negara, sedang menyusun draf UU IKN-nya. Karena itu, UU Pemprov DKI Jakarta itu juga harus diubah. Sembari paralel pembahasan UU IKN di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.

"Kalau UU IKN bisa paralel, UU IKN di Kaltim dibahas juga, kemudian diundangkan, otomatis UU DKI bisa dilaksanakan pembahasannya sama saat itu juga," kata Tito.

Namun, jika pembahasan UU IKN menyusul kemudian, karena IKN-nya belum pindah, maka Tito mengatakan opsinya adalah mengubah Jakarta menjadi Pusat Ekonomi dan Bisnis.

Mantan Kapolri itu menjelaskan, penyusunan RUU IKN dipimpin Bappenas

karena sifatnya yang lintas sektoral. Dengan demikian, tidak dapat dikerjakan hanya oleh Kemendagri.

"IKN ini lintas sektoral melibatkan satu pengadaan tanahnya, dua melibatkan Kementerian ATR, melibatkan Kementerian KLH, melibatkan pemerintah daerah untuk tanahnya, melibatkan Menko Maritim dan Investasi untuk masalah investasi pembangunan," ujarnya.

Dia pun mengakui, Kemendagri tak lagi 'powerfull' seperti dulu. Sebab, sudah ada pembagian kewenangan. "Kalau Kemendagri zaman dulu dia powerfull. Semua itu sudah lintas sektoral yang tidak bisa dikerjakan dengan power Kemendagri saat ini. Kalau Kemendagri zaman dahulu iya powerfull," urai dia.

"Nah, ini sudah dibagi-bagi kewenangan Kemendagri di tempat lain, sehingga presiden memutuskan itu dibentuk Bappenas lead, membentuk badan Otorita. Badan Otorita ini setingkat menteri yang berhubungan langsung dengan

presiden dan dia mencakup lintas sektoral," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI mempertanyakan kenapa kajian dan penyusunan RUU IKN tidak dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melainkan oleh Bappenas.

"Kalau kita lihat UUD, Kemendagri ini termasuk kementerian utama. Karena itu saya protes pak, pak, IKN *leading sector*-nya Bappenas Pak Menteri? Tidak cocok, Bappenas itu sektoral. Sekarang juga ada di Komisi XI dan dia lebih kepada pengkajian," ungkap Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1).

Menurut politisi PKS itu, Kemendagri memiliki posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan Bappenas. Jadi sudah seharusnya perumusan RUU IKN dipimpin oleh Kemendagri. "Karena ada 12 posisi setara direktor jenderal. Belum lagi staf ahli. Jadi luar biasa powerfull-nya kementerian kita," tegas Mardani.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Cornelis. Menurut dia, IKN merupakan tanggung jawab Kemendagri. "Lalu pemindahan ibu kota negara, kenapa Bappenas yang menanganinya? Seyogianya Kemendagri. Karena ini menyangkut Kementerian Dalam Negeri," jelas dia.

Dia pun meminta agar RUU IKN segera diselesaikan. Hal ini berkaitan dengan kejelasan status Jakarta jika IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur. "UU-nya ini tolong segera dibuat. Masalah ibu kota DKI karena dia jadi ibu kota negara diberlakukan istimewa. Tapi, kalau berubah, cabut seperti provinsi lain yang tidak istimewa," tegas dia. (aen)



Tito Karnavian

CHARLENDOS